

Judul : DPR Akui Kinerjanya Menurun
Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

DPR Akui Kinerjanya Menurun

[JAKARTA] Kinerja DPR terutama dalam menjalankan fungsi legislasi sangat rendah. Apalagi menjelang memasuki masa akhir purnatugas DPR periode 2014-2019 yang kembali akan disibukkan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Prestasi kerja anggota DPR bisa dilihat dari target prolegnas prioritas sebanyak 52 RUU hanya enam yang disahkan menjadi UU dan delapan di antaranya masih dalam tahap harmonisasi. Pada 2018 ini DPR mematok 50 RUU prolegnas prioritas yang entah berapa akan sampai pada pengesahan menjadi UU. Pimpinan dan anggota DPR mengakui kinerja fungsi legislasi menurun.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, Johnny G Plate menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya fungsi legislasi di DPR. "Sejak awal menetapkan Prolegnas asal-asalan. Tidak melalui studi yang matang. Taruh daftarinya sekian puluh, memang bisa? Tidak mungkin," kata Johnny G Plate di Jakarta, Kamis (8/2).

Menurut Plate, dalam menetapkan Prolegnas sebaiknya juga dilakukan dengan mempertimbangan kemampuan, kesiapan dan ketersediaan sumber daya yang ada di DPR dan pemerintah.

Selanjutnya, dalam penetapan jumlah Prolegnas sebaiknya juga dilihat dari kesiapan komisi-komisi yang ada di DPR. Jangan dipukul rata karena ada UU yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, namun juga ada UU yang hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja.

Dalam penyusunan Prolegnas UU di DPR, Plate juga mengkritisi adanya kondisi yang membuat penyelesaian prioritas UU yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada sejumlah UU yang malah diprioritaskan karena kebutuhan politik.

"Prolegnas itu adalah UU prioritas. Tapi apakah urutan semuanya prioritas, sesuai kebutuhan masyarakat? Tidak juga. Ini ada yang prioritasnya bukan prioritas



Johnny G Plate



Eva Kusuma Sundari



Fahri Hamzah

masyarakat, tetapi prioritas politik, prioritas DPR," ungkapnya.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari, kepemimpinan di panitia khusus (pansus) pembuatan undang-undang kerap menjadi masalah. Ketika pimpinan sudah mengagendakan rapat pembahasan sebuah rancangan undang-undang, justru kerap anggotanya tak kuorum. Kalau pimpinan Pansus tidak pintar-pintar mengakali persyaratan, maka pembahasan bisa molor terus.

Ada juga kejadian di mana sudah ada kesepakatan pembahasan sebuah rancangan undang-undang di antara fraksi, tetapi rapat pembahasan tak kunjung dilakukan dengan pemerintah. Masalah lainnya, pembuatan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebuah RUU kadangkala menjadi masalah karena ada fraksi yang lelet mengerjakannya. Kelambanan sebuah fraksi menyandera proses pembahasan berikutnya.

Karena itu harus ada *review* yang kuat soal kinerja pimpinan pansus. "Ini karena memang ada kelemahan sistemik atas sistem yang selama ini dijalankan. Kejadian belakangan ini tak terjadi di sistem pemilu tertutup. Begitu diganti sistem terbuka, justru makin tak produktif. Mungkin karena *one man one vote* tak cocok dengan kultur kita," kata Eva Sundari. Sistem tertutup, menurut

Eva, bisa menghasilkan input anggota yang lebih dedikatif ke parlemen.

Masalah sistemik lainnya adalah di jajaran pimpinan dewan, karena adanya UU MD3 menyebabkan unsur pimpinan DPR tak melibatkan unsur parpol pemenang pemilu yang merupakan pendukung utama pemerintahan, yakni Fraksi PDI-P. "Semoga hal-wanya berubah (setelah revisi UU MD3, Red). Ada PDI-P dan Golkar yang pro-Jokowi untuk lebih *concern* ke produktivitas lembaga," ujar Eva.

Terpengaruh

Terkait tingkat kehadiran anggota dewan yang rendah yang menyebabkan rendahnya kinerja legislasi apalagi akan ada momen politik pemilu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui bahwa tahun politik ini memang berpengaruh terhadap aktivitas di DPR.

Namun, terkait kelambanan legislasi, Fahri menuding pemerintah atau eksekutif berperan besar. Pemerintah dinilai menyuplai rancangan undang-undang yang begitu banyak pada program legislasi nasional (Prolegnas) tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga yang nampak paling sulit untuk diajak menyelesaikan RUU.

"Karena (draft RUU) versi eksekutif itu lebih berat untuk disinkronkan dari pada versi anggota DPR," katanya.

Pengalaman selama ini, bila pemerintah memang menuntut dengan serius biasanya sebuah RUU bisa cepat selesai. Sebaliknya, bila pemerintah tidak terlalu semangat biasanya tidak selesai.

Pernyataan Fahri ini bisa berarti juga bahwa RUU yang berkaitan dengan kepentingan atau kemauan DPR bisa cepat selesai sedangkan RUU di luar itu lebih lambat. Ia menyontohkan, pembahasan revisi UU MD3, yang beberapa kali direvisi, bisa selesai dengan cepat karena menyangkut kepentingan fraksi di DPR.

Fahri menambahkan, tak adil bila pemenuhan target pembuatan undang-undang seakan-akan menjadi satu-satunya ukuran kinerja parlemen. Baginya, sejak awal sudah ada kekeliruan dalam memahami yakni dengan menganggap bahwa produk UU hanya karya DPR semata padahal dalam prosesnya dilaksanakan bersama-sama pemerintah.

"Kalau mau adil, revisi saja UUD 1945 untuk menekankan bahwa legislasi hanyalah kerja DPR tanpa melibatkan pemerintah. Apabila isinya sudah seperti itu, maka adil bila menyalahkan DPR atas rendahnya capaian pembuatan UU," katanya.

Menurut Plate, jika ingin mengukur kinerja legislasi di DPR sebaiknya tidak dilihat dari jumlah atau kuantitas UU yang disahkan dari jumlah Proleglas

yang ditetapkan, tetapi dari segi berapa banyak UU berkualitas yang dihasilkan DPR yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Banyaknya UU dengan kualitas UU tidak berjalan paralel. Kita butuh banyak UU tapi tidak berkualitas apa sedikit UU, tetapi berkualitas. Dalam artian berkualitas karena relevan dengan kebutuhan masyarakat?" ucap Plate.

Selama ini, Fraksi Nasdem di DPR sendiri terus mendorong dilahirkannya UU yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Bukan kuantitas UU tetapi sama sekali tidak membawa perubahan positif di masyarakat.

"Kalau mau mengukur kinerja, harus melihat UU yang berkualitas yang relevan untuk masyarakat. Bukan banyak sedikitnya UU yang disahkan. Tidak hanya sekedar ketok palu," kata Plate.

Sedangkan Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya sangat menyadari soal target legislasi menyangkut juga dengan citra parlemen.

Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi, katanya, tetap berkomitmen menjaga para anggotanya agar tidak mengabaikan tugas-tugas kenegaraan. "Saya jamin DPR tetap aktif menjalankan tugas dan fungsinya. Komisi maupun alat kelengkapan dewan akan tetap menjalankan sidang maupun rapat konsultasi dengan para mitra kerja," ujar terkait partai politik yang akan disibukkan persiapan Pemilu 2019.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, dari target 50 RUU yang masuk dalam prolegnas 2018 ini 47 RUU diantaranya merupakan luncuran tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, hanya 3 RUU baru yang diajukan diantaranya RUU tentang Pendidikan Keadokteran dan RUU tentang Penyadapan.

Supratman mengaku prihatin dengan rendahnya kehadiran pemerintah dalam pembicaraan terkait RUU di parlemen. Padahal, prolegnas disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. [H-14/MJS/Y-7]